

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Pembangunan merupakan suatu upaya untuk mencapai kesejahteraan, dan negara memiliki peranan besar dalam hal tersebut. Peran negara mencakup upaya untuk menggali segala sumber daya seperti pajak, eksploitasi sumber daya alam, dan lain sebagainya. Negara berkewajiban membuat kebijakan atau undang-undang untuk mengatur warga negara serta mengatur barang publik, negara menyediakan anggaran guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan sehingga pelayanan publik dapat terlaksana dengan baik<sup>1</sup>.

Kemiskinan merupakan masalah yang multidimensi dan multisektor dengan beragam karakteristik, yang merupakan kondisi yang harus segera diatasi untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan manusia yang bermartabat, kemiskinan juga menimbulkan ketidakmampuan masyarakat miskin untuk mendapat rumah yang layak huni dan terjangkau serta memenuhi standar lingkungan yang sehat, aman, harmonis, dan berkelanjutan. Hal ini disebabkan karena terbatasnya sumber daya termasuk informasi yang berkaitan pertanahan dan perumahan.

Rumah merupakan kebutuhan yang sangat mendasar selain sandang dan pangan yang masih belum sempat terpenuhi oleh seluruh masyarakat. Rumah tidak harus terlihat mewah untuk sekedar memenuhi standar rumah sehat dan

---

<sup>1</sup> Bawenti, J. R., Singkoh, F., & Kimbal, A. 2019. *Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Bagi Masyarakat Kurang Mampu Didesa Wasilei Kecamatan Wasilei Selatan Kabupaten Halmahera Timur*. Jurnal Eksekutif, Volume 3 Nomor 3, hal 31.

layak huni, dan untuk memenuhi kebutuhan tersebut bukanlah hal yang mudah bagi sebagian besar masyarakat yang tergolong keluarga yang miskin rumah hanyalah tempat singgah keluarga tanpa melihat kelayakan dari segi fisik, mental dan sosial.

Perumahan dan pemukiman merupakan salah satu keperluan dasar manusia, yang juga mempunyai peran yang sangat strategis sebagai pusat pendidikan pada keluarga, persemaian budaya, dan peningkatan kualitas generasi mendatang. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari pemukiman, baik perkotaan maupun pedesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni<sup>2</sup>.

Pemerintah melakukan usaha-usaha pembangunan rumah dalam rangka pemenuhan keperluan perumahan dengan melibatkan berbagai pihak. Usaha pemerintah ini tidak terlepas dari tujuan negara untuk menciptakan kesejahteraan rakyat. Namun sayangnya hak dasar rakyat tersebut pada saat ini masih belum sepenuhnya terpenuhi, salah satu penyebabnya adalah adanya kesenjangan pemenuhan keperluan perumahan yang relatif masih besar. Hal tersebut terjadi antara lain karena masih kurangnya kemampuan daya beli masyarakat khususnya masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dalam memenuhi keperluan akan rumahnya.

Pemerintah bertanggungjawab untuk memberikan fasilitas kepada masyarakat agar dapat menghuni rumah yang layak dan sehat. Untuk itu, pemerintah perlu menyiapkan program-program pembangunan perumahan yang

---

<sup>2</sup> Mustari, Nuryanti. 2011. Implementasi Kebijakan Peningkatan Kompetensi Pendidik Melalui Peningkatan Rasio Pendidik & Pemerataan Penyebaran Pendidik Di Kabupaten Jeneponto." *Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan* Volume 1 Nomor 1, hal: 25–41.

khususnya untuk masyarakat berpenghasilan rendah untuk mendapatkan rumah yang layak huni. Dari banyaknya program pemerintah tentang rumah bagi MBR ada program yang dikeluarkan pada akhir tahun 2015 yaitu program BSPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya), *berdasarkan peraturan kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat nomor 13/PRT/M/2016* tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya merupakan program untuk meningkatkan prakarsa Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dalam membangun/peningkatan kualitas rumah beserta Prasarana, Sarana, Utilitas Umum (PSU) sehingga menjadikan perumahan yang sehat, aman, serasi, dan teratur serta berkelanjutan.<sup>3</sup>

Berdasarkan pertimbangan tersebut dan berlandaskan kepada UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman maka telah dikeluarkan Kebijakan dan Strategi Nasional Perumahan dan Permukiman Tahun 2011, untuk mencapai Tujuan dan Sasaran Pembangunan Perumahan Rakyat tahun 2010-2014, mewujudkan Visi Pembangunan Perumahan Rakyat secara bertahap dan sistematis, serta sejalan dengan Misi Kementerian Negara Perumahan Rakyat maka Kebijakan Pembangunan Perumahan Rakyat tahun 2010-2014, arah kebijakan dan program, diantaranya diarahkan pada :

1. Mengembangkan pembangunan perumahan dan permukiman yang bertumpu pada keswadayaan masyarakat;
2. Meningkatkan fasilitasi dan upaya pemberdayaan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan rumah yang layak;
3. Meningkatkan peran pemerintah daerah dalam pembangunan perumahan;

---

<sup>3</sup> Mailasari, N. 2016. Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Tahun 2016 (Studi Kasus Kota Pekanbaru). 4(2): 3345-56.

4. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan pelaku pembangunan Perumahan dan Permukiman.

Salah satu program yang dilahirkan oleh Pemerintah tentang pemenuhan kebutuhan pokok adalah program revitalisasi rumah yang tidak layak huni melalui Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Program ini pada tahun 2014 melekat pada Kementerian Perumahan Rakyat. Berdasarkan angka kekurangan rumah (*backlog*) yang mencapai 13,5 juta, sebanyak 3,4 juta merupakan rumah tidak layak huni sementara kebutuhan rumah untuk keluarga baru di Indonesia mencapai 800 ribu unit rumah per tahun. Jadi program ini untuk membantu meningkatkan kualitas tempat tinggal masyarakat kurang mampu di seluruh Indonesia.<sup>4</sup>

Berdasarkan hasil observasi awal yang peneliti lakukan di Desa Kurup Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera-Selatan, taraf kemiskinan di Desa Kurup Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten Ogan Komering Ulu masih relatif tinggi hal ini terbukti masih ada sekitar 30 orang masyarakat yang belum memiliki rumah layak huni, misalnya belum tersedianya fasilitas Mandi Cuci Kakus (MCK), belum tersedia sumber air bersih, belum adanya pemisahan antara dapur dan Mandi Cuci Kakus (MCK). Pemerintah Daerah memiliki peran yang penting dalam pembangunan perumahan, sebab Pemerintah daerah adalah pihak yang mengetahui berapa jumlah keperluan hunian masyarakat. Meskipun pembangunan perumahan yang layak sudah diarahkan agar

---

<sup>4</sup> Zulkarnain. 2016. "Implementasi Kebijakan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Di Kecamatan Parigi." *Katalogis* 4(10): 52-63. <http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/Katalogis/article/view/7004>.

terjangkau oleh masyarakat berpenghasilan rendah, akan tetapi sasaran ini masih belum tercapai secara menyeluruh.

Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan sebelumnya sehingga peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut terkait permasalahan tersebut dengan mengangkat judul “Implementasi Kebijakan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Bagi Masyarakat Kurang Mampu di Desa Kurup Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten Ogan Komering Ulu”.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Masalah diartikan sebagai suatu keadaan yang bersumber dari hubungan antara dua faktor atau lebih yang menghasilkan situasi yang menimbulkan tanda tanya dan dengan sendirinya memerlukan upaya untuk mencari suatu jawaban<sup>5</sup>. Berdasarkan uraian diatas maka permasalahan dalam penelitian ini adalah: bagaimana Implementasi Kebijakan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Bagi Masyarakat di Desa Kurup Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten Ogan Komering Ulu?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Tujuan adalah rumusan kalimat yang menunjukkan adanya hasil, sesuatu hal yang ingin diperoleh/dicapai setelah penelitian selesai.<sup>6</sup> Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis Implementasi Kebijakan Program Bantuan

---

<sup>5</sup> Lexy J. Moleong. *Metedologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2012.Hal: 93

<sup>6</sup> Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta:Rineka Cipta. 2010.Hal: 97

Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Bagi Masyarakat di Desa Kurup Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten Ogan Komering Ulu.

#### **1.4. Kegunaan Penelitian**

Manfaat adalah suatu kegunaan. Manfaat dalam suatu penelitian penting sebagai kelanjutan dari tujuan penelitian. Sehingga apa yang nantinya akan dicapai dalam penelitian ini akan terlihat sejauh mana sumbangannya terhadap institusi, kelompok maupun kemajuan ilmu pengetahuan.<sup>7</sup> Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat:

- (a) Secara praktis sebagai masukan bagi Pemerintah dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).
- (b) Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat dapat memberi kontribusi positif terhadap implementasi kebijakan program ini kedepannya, yakni sebagai acuan dan koreksi terhadap implementasi yang ada sebelumnya, dengan demikian implementasi program ini berjalan dengan baik sehingga masyarakat berpenghasilan rendah yang ada di desa Kurup Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten Ogan Komering Ulu dapat menempati rumah yang layak, aman, nyaman, dan sehat.

---

<sup>7</sup> Suharsimi, Arikunto. *Ibid.* Hal: 99